

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Profil Desa Blumbungan

a. Gambaran Umum Desa Blumbungan

Desa Blumbungan adalah salah satu Desa yang berada di Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan yang mempunyai penduduk padat dan merupakan salah satu Desa terbesar di Kecamatan Larangan, jarak dari kota \pm 9 km, sedangkan jarak dari ibu kota Pamekasan \pm 5 km. Desa Blumbungan memiliki ketinggian tanah antara 5 s/d 15 m dari atas permukaan laut bertopografi datar sampai berbukit dengan kemiringan 0-8 %, dan luas wilayah 36.968,285 Ha dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Letak Batas Wilayah Desa Blumbungan

No.	Letak Batas	Daerah Batasan
1.	Sebelah Utara	Desa Bangkes Kecamatan Kadur.
2.	Sebelah Timur	Desa Grujugan Kecamatan Larangan.
3.	Sebelah Selatan	Desa Sentol Kecamatan Pademawu.
4.	Sebelah Barat	Kecamatan Kota dan Kecamatan Pegantenan.

Sumber: Profil Desa Blumbungan

Jumlah penduduk 19.044 jiwa dengan 5.613 Kepala Keluarga (KK) untuk lebih jelasnya pada tabel berikut:

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Desa Blumbungan

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	9.131 jiwa
2.	Perempuan	9.913 jiwa
Jumlah Penduduk		19.044

Sumber: Sekretaris Desa Blumbungan

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa di Desa Blumbungan dari keseluruhan 19.044 jiwa penduduk. Lebih banyak penduduk perempuan dibandingkan penduduk yang berjenis kelamin laki-laki. Jumlah Dusun di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan kabupaten Pamekasan terdapat 16 Dusun, lebih jelasnya pada tabel berikut:

Tabel 4.3
Jumlah Dusun di Desa Blumbungan

No.	Nama Dusun
1.	Dusun Aeng Penay
2.	Dusun Bantar
3.	Dusun Berruh
4.	Dusun Duwa' Tinggi
5.	Dusun Garuk
6.	Dusun Kaju Rajah
7.	Dusun Kendal
8.	Dusun Nyalaran
9.	Dusun Pandiyan
10.	Dusun Pangganten
11.	Dusun Polay
12.	Dusun Sumber Batu
13.	Dusun Talaga
14.	Dusun Tambak

15.	Dusun Tomang Mateh
16.	Dusun Toron Samalem

Sumber: Sekretaris Desa Blumbungan

b. Visi dan Misi

Visi

Gotong Royong Membangun Desa Blumbungan Yang Jujur, Adil, Sejahtera, Berbudaya, dan Berakhlak Mulia.

Misi

- 1) Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat desa yang maksimal
- 2) Pemerataan jaminan kesehatan bagi warga kurang mampu
- 3) Mewujudkan pemerintahan desayang jujur dan berwibawa dengan pengambilan keputusan yang cepat tepat
- 4) Mengedapankan kejujuran dan musyawarah mufakat dalam kehidupan sehari-hari baik dengan pemerintahan desa maupun dengan masyarakat desa
- 5) Mewujudkan sarana dan prasarana desa yang merata dan memadai
- 6) Meningkatkan profesionalitas dan mengaktifkan seluruh perangkat desa
- 7) Mewujudkan perekonomian dan kesejahteraan warga desa Blumbungan
- 8) Meningkatkan kehidupan desa secara dinamis dalam segi keagamaan, kebudayaan, dan keamanan.

c. Tingkat Pendidikan di Desa Blumbungan

Sebagian besar penduduk Desa Blumbungan mempunyai tingkat pendidikan SD/MI, penduduk yang mayoritas mempunyai tingkat pendidikan SD/MI

umumnya masyarakat yang telah berusia diatas 50 tahun. Hal itu disebabkan karena minimnya peekonomian masyarakat dulu dan juga minimnya tingkat sekolah lanjutan di Desa Blumbungan, hanya orang-orang yang memiliki perekonomian diatas rata-rata yang bisa melanjutkan pendidikannya karena dulu untuk melanjutkan ke tingkat SMP/SLTP harus ke kota.

Namun sekarang sarana pendidikan di Desa Blumbungan sudah lumayan banyak, yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.4
Sarana Pendidikan di Desa Blumbungan

No.	Sarana Pendidikan	Jumlah
1.	TK/RA	10 sekolah
2.	SD/MI	17 sekolah
3.	SMP/MTS	9 sekolah
4.	SMA/MA	8 sekolah

Sumber: Sekretaris Desa Blumbungan

Dari tahun ke tahun tingkat pendidikan di Desa Blumbungan mengalami pertumbuhan secara signifikan. Hal ini dibuktikan dengan tingkat pendidikan masyarakat Desa Blumbungan yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.5
Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Blumbungan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Sekolah Dasar / MI	5.451 orang
2.	SLTP/MTs	2.841 orang
3.	SLTA/MA	2.518 orang
4.	Akademi/D1-D3	525 orang
5.	Sarjana (S1)	1.843 orang
6.	Sarjana (S2)	55 orang
7.	Sarjana (S3)	2 orang

Sumber: Sekretaris Desa Blumbungan

d. Gambaran Potensi Desa

Desa Blumbungan menunjukkan pertumbuhan yang sangat positif, ditandai dengan peningkatan pembangunan infrastruktur dan pengadaan sarana prasarana dari tahun ketahun. Dari aspek pendidikan dan perekonomian mayoritas masyarakat Desa Blumbungan dapat dikatakan sudah mencapai kesejahteraan yang secara tidak langsung mempengaruhi kemajuan Desa Blumbungan. Sedangkan untuk aspek keagamaan masyarakat Desa Blumbungan memiliki semangat keagamaan dan komitmen yang cukup tinggi.

Selain berprofesi sebagai petani, masyarakat di Desa Blumbungan juga terdapat usaha rumahan milik warga yang menjadi produk unggulan. Produk unggulan tersebut adalah keripik singkong dan pembuatan tahu, namun selain itu masih banyak usaha rumahan yang ada di Desa Blumbungan seperti, permeubelan, pembuatan pilar, dan pembuatan rokok.

Kondisi sosial-ekonomi dan budaya masyarakat serta aktifitas masyarakat Desa Blumbungan banyak dipengaruhi oleh kegiatan sosial keagamaan. Kegiatan keagamaan tersebut diantaranya adalah:

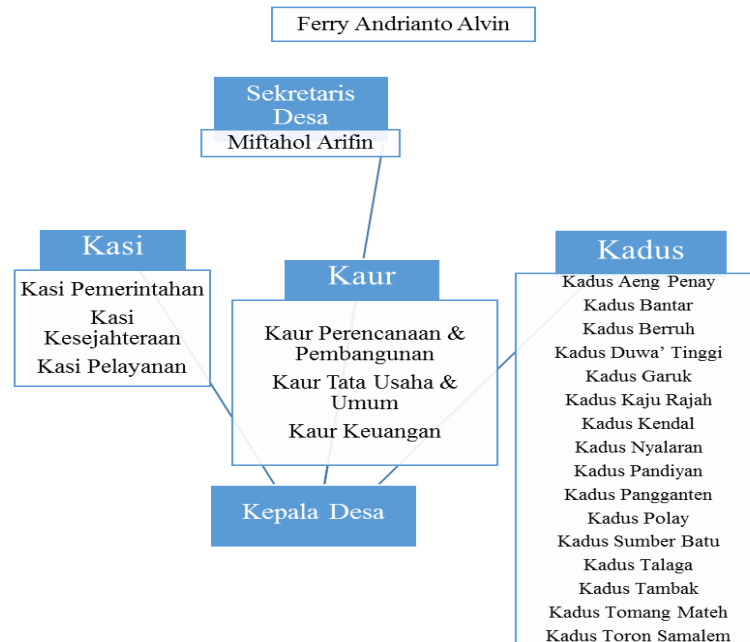
- 1) Karang Taruna, meliputi kegiatan kesenian hadrah, PHBI, dan olahraga.
- 2) Remaja Masjid, meliputi kegiatan PHBI, Majelis Ta'lim, dan diskusi agama.
- 3) PKK Desa, meliputi pengajian rutin dan pembinaan warga khususnya perempuan muslim.
- 4) Kelompok Pengajian, meliputi kegiatan tahlil, yasinan, dan majlis ta'lim.

- 5) Kelompok Tani, meliputi Bina Karya, Karya Utama, Bahtera, Hujan Nabati, Harapan Makmur, Sumber Rejeki, Tunas Harapan, Air Mengalir, Swasembada, Sentosa, Srikarya, Tambak Jaya, Mekar Sari, Setia Kawan, dan Bangkit Bersama yang ada di Desa Blumbungan meliputi kegiatan tahlilan, arisan, dan musyawarah poktan.
- 6) Pengembangan industri kecil/rumah tangga seperti, keripik singkong, pembuatan rokok, permeubelan, pembuatan pilar, dan produksi tahu.
- 7) Ketersediaan potensi pertanian yang didukung adanya lahan pertanian yang luas.
- 8) Adanya potensi dektor peternakan sapi, kambing, ayam, dan budidaya ikan air tawar.
- 9) Berkembangnya perajin batu untuk keperluan bangunan.
- 10) Dukungan ulama' dan tokoh masyarakat dalam pembangunan.
- 11) Suasana keidupan yang kondusif di masyarakat.
- 12) Tingginya partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
- 13) Berkembangnya lembaga pendidikan keagamaan dan pendidikan non formal.

Potensi-potensi tersebut merupakan modal yang kuat dalam pembangunan Desa Blumbungan dan dapat dijadikan wahana transfer pemecahan masalah dan potensi ke jenjang perberdayaan masyarakat yang berkelanjutan dan berkesinambungan sehingga diharapkan dapat menjadi embrio bagi kelanjutan pembangunan Desa Blumbungan kedepannya.

d. Struktur Perangkat Desa Blumbungan

Gambar 4.1
Struktur Perangkat Desa Blumbungan



e. Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Desa Blumbungan

1) Kepala Desa

Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggara Pemerintahan Desa, Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintah Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Desa memiliki wewenang sebagai berikut:

- a) Untuk memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
- b) Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa,
- c) Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa,
- d) Menetapkan peraturan desa,
- e) Menetapkan APBDesa,
- f) Membina kehidupan masyarakat desa,
- g) Memanfaatkan teknologi tepat guna,

- h) Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa,
- i) Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa,
- j) Mengembangkan sumber pendapatan desa,
- k) Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa,
- l) Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa,
- m) Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif,
- n) Mewakili desa didalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum dalam mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
- o) Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2) Sekretaris Desa

Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan, fungsi-fungsi dari sekretaris adalah sebagai berikut:

- a) Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti, tata naskah, administrasi surat-menyurat, arsip, dan ekspedisi,
- b) Melaksanakan urusan umum seperti, pelayanan umum, penataan administrasi perangkat desa, perjalanan dinas, dll.,
- c) Melaksanakan urusan keuangan seperti, pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan

kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan lainnya,

- d) Melaksanakan urusan perencanaan seperti, menyusun rencana APBDesa, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

3) Kaur TU dan Umum

Kepala Urusan Umum membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Kepala Urusan Umum memiliki fungsi pelaksanaan urusan ketatausahaan seperti:

- a) Fungsi administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat desa,
- b) Penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor,
- c) Penyiapan rapat,
- d) Pengadministrasian asset,
- e) Inventarisasi,
- f) Perjalanan dinas, dan pelayanan umum, dan
- g) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan sekretaris desa atau kepala desa.

4) Kaur Perencanaan dan Pembangunan

Kepala Urusan Perencanaan dan Pembangunan bertugas membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-

tugas pemerintahan. Kepala urusan perencanaan dan pembangunan memiliki fungsi pengoordinasikan urusan perencanaan seperti:

- a) Menyusun rencana APBDesa,
- b) Menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan,
- c) Melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan, dan
- d) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan ole sekretaris desa dan kepala desa.

5) Kaur Keuangan

Kepala Urusan Keuangan bertugas membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Kepala urusan keuangan memiliki fungsi pelaksanaan urusan keuangan seperti:

- a) Pengurusan administrasi keuangan,
- b) Administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran,
- c) Verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.

6) Kasi Pemerintahan

Kepala Seksi Pemerintahan bertugas sebagai membantu kepala desa dalam pelaksana tugas operasional. Fungsi Kasi Pemerintahan adlah sebagai berikut:

- a) Melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan,
- b) Penyusunan rancangan regulasi desa,
- c) Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarak desa,

- d) Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelaksanaan administrasi kependudukan tingkat desa,
- e) Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelaksanaan administrasi pertanahan tingkat desa,
- f) Penataan dan pengelolaan wilayah,
- g) Pendataan dan pengelolaan profil desa,
- h) Pemantauan kegiatan sosial politik di desa,
- i) Penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa, laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan dan pemberian informasi penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat,
- j) Pelayanan kepada masyarakat,
- k) Penyusunan laporan pelaksanaan seluruh kegiatan sesuai bidang tugasnya,
- l) Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala desa mengenai kebijakan dan tindakan yang akan diambil di bidang tugasnya,
- m) Pelaksanaan fungsi lain yang akan diberikan oleh kepala desa.

7) Kasi Kesejahteraan

Kepala Seksi Kesejahteraan bertugas sebagai membantu kepala desa dalam pelaksanaan tugas operasional. Fungsi dari kepala seksi kesejahteraan adalah sebagai berikut:

- a) Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat,
- b) Penginventarisir dan pemantauan pelaksanaan pembangunan dan administrasi pembangunan tingkat desa,

- c) Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelaksanaan peningkatan sarana prasarana pembangunan desa,
- d) Pelaksanaan kegiatan sosialisasi serta motivasi masyarakat dibidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda olahraga dan karang taruna,
- e) Penyiapan konsep rancangan peraturan desa tentang rencana pembangunan jangka menengah desa, rencana kerja pemerintah desa serta peraturan desa lainnya sesuai bidang tugasnya,
- f) Pelayanan kepada masyarakat,
- g) Penyusunan laporan pelaksanaan seluruh kegiatan sesuai bidang tugasnya,
- h) Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala desa mengenai kebijakan dan tindakan yang akan diambil di bidang tugasnya, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala desa.

8) Kasi Pelayanan

Kepala Seksi Pelayanan bertugas sebagai membantu kepala desa dalam pelaksanaan tugas operasional. Kasi Pelayanan juga memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:

- a) Penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat,
- b) Peningkatan upaya partisipasi masyarakat,
- c) Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi kegiatan penyandang masalah kesejahteraan sosial dan bidang sosial lainnya,
- d) Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi kegiatan pelestarian nilai sosial budaya masyarakat dan ketenagakerjaan,

- e) Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan keagamaan,
- f) Penyiapan konsep rancangan peraturan dengan sesuai bidang tugasnya,
- g) Pelayanan kepada masyarakat,
- h) Penyelenggaraan pengembangan peran serta keswadayaan masyarakat,
- i) Penyusunan laporan pelaksanaan seluruh kegiatan sesuai bidang tugasnya,
- j) Pemebruan saran dan pertimbangan kepada kepala desa mengenai kebijakan dan tindakan yang akan diambil di bidang tugasnya.
- k) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan kepala desa.

9) Kepala Dusun

Kepala dusun memiliki kedudukan sebagai unsur pelaksana tugasnya kepala desa dalam wilayah kerjanya, serta menjalankan kegiatan kepala desa dalam kepemimpinan kepala desa di wilayahnya. Kepala dusun juga mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut:

- a) Pelaksanaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah kerjanya,
- b) Penyusunan perencanaan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan di wilayah kerjanya,
- c) Pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan,

- d) Pelaksanaan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan,
- e) Pelayanan kepada masyarakat,
- f) Pelaporan pelaksanaan tugas di wilayah kerjanya kepada kepala desa,
- g) Pembrian saran dan pertimbangan kepada kepala desa mengenai kebijakan dan tindakan yang akan diambil dibidang tugasnya,
- h) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala desa.

2. Analisis Latar Belakang Pendidikan Dalam Akuntabilitas Laporan Keuangan Di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.

Dalam menganalisis latar belakang pendidikan memiliki dampak atau tidak dalam akuntabilitas laporan keuangan di Desa Blumbungan, Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, peneliti memiliki empat informan atau narasumber yakni, Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa/Kaur Keuangan, dan Kaur Perencanaan.

a. Kepala Desa

Kepala Desa merupakan seorang yang memiliki tanggungjawab penuh terhadap apa yang telah diberikan oleh pemerintah untuk direalisasikan kepada masyarakat. Kepala Desa juga memiliki tanggungjawab penuh terhadap dana desa yang masuk ke rekening desa sampai pelaporan keuangan desa. Persetujuan dari Kepala Desa adalah kebutuhan penting bagi perangkat desa lainnya untuk

mendapatkan persetujuan agar dapat merealisasikan anggaran dan menyampaikan laporan keuangan desa kepada masyarakat.

Kepala Desa juga memiliki peran untuk selalu mengawasi perangkat desa lainnya untuk selalu menjalankan tanggungjawab masing-masing yang telah direncanakan dan disetujui.

Ada empat poin pertanyaan yang terhadap kepala desa untuk mengukur dampak latar belakang pendidikan dalam akuntabilitas laporan keuangan yakni, cara merekrut perangkat desa, keselinieran latar belakang pendidikan perangkat desa dengan jabatan yang di emban, keaktifan dan tanggung jawab perangkat desa, dan upaya yang dilakukan kepala desa terhadap kinerja perangkat desa.

1) Cara Merekrut Perangkat Desa

Menurut Ferry Andrianto Alvin, S.Pd. selaku kepala desa Blumbungan dalam merekrut perangkat desa Blumbungan adalah dengan melakukan musyawarah atau rapat internal dengan tim sukses yang telah membantu menjadikan kepala desa, agar mendapatkan arahan-arahan dan aspirasi dari teman tim suksesnya. Kemudian, setelah musyawarah internal telah dilakukan kepala desa Blumbungan memanggil masyarakat yang diusulkan oleh tim sukses untuk dijadikan perangkat desa.

Adapun hasil wawancara dari kepala desa Blumbungan mengenai cara merekrut perangkat desa di Desa Blumbungan adalah:

”Berbicara tentang cara merekrut perangkat desa di Desa Blumbungan itu dipilih dari rapat internal dengan tim sukses saya setelah saya dinyatakan menang dalam pemilihan kepala desa waktu itu. Dalam rapat itu saya juga membahas perangkat desa yang akan mendampingi dan membantu saya dalam mejadikan Desa Blumbungan yang maju dari tahun-tahun sebelumnya, ada beberapa nama yang sempat diusulkan tim sukses saya waktu itu dan Alhamdulillah semua nama yang diusulkan oleh tim sukses

saya memiliki potensi yang sangat bagus untuk menjadi perangkat desa di Desa Blumbungan ini.”¹

Dari hasil wawancara di atas, kepala desa Blumbungan Ferry Andrianto Alvin, S.Pd. menyampaikan bahwa cara perekrutan perangkat desa di Desa Blumbungan hanya melalui rapat internal dengan tim sukses atau tim kemenangan.

2) Latar Belakang Pendidikan Perangkat Desa

Dalam menjalankan suatu tugas dalam pekerjaan kita dituntut untuk menyelesaikan tugas tersebut, tidak jarang seorang karyawan atau dalam hal ini perangkat desa mempunyai kendala dalam menyelesaikan tugasnya. Banyak kendala yang dilewati oleh perangkat desa karena kurangnya kemampuan yang dimiliki oleh seorang individu atau perangkat desa tersebut, dan tidak sesuai latar belakang pendidikannya dengan jabatan yang diemban sehingga sulit untuk menyelesaikan tugas yang diamanahkan kepada seorang perangkat desa. Bahkan di Desa Blumbungan ketidaksesuaian latar belakang perangkat desa dengan jabatan yang diemban itu terjadi, sebagaimana yang dikatakan oleh Kepala Desa Blumbungan Ferry Andrianto Alvin, S.Pd. sebagai berikut:

“Nama-nama yang diusulkan oleh tim sukses atau tim kemenangan saya tidak satupun yang sama anantara pendidikannya dengan jabatan yang saya kasih di Pemerintah Desa, saya hanya bermodal yakin dan percaya atas pilihan tim sukses saya. Karena saya melihat masyarakat-masyarakat yang dipilih oleh tim sukses saya memiliki potensi diri yang sangat bagus, masalah dia bisa menyelesaikan tugasnya atau tidak nanti bisa selesaikan seacara bersama-sama, karena dalam tujuan saya menekankan pada kegiatan gotong-royong.”²

¹ Wawancara langsung dengan Kepala Desa Blumbungan Bapak Ferry, tanggal 22 April 2022

² Wawancara langsung dengan Kepala Desa Blumbungan Bapak Ferry, tanggal 22 April 2022

Berdasarkan penuturan dari kepala desa diatas dapat disimpulkan bahwa tidak ada satupun perangkat desanya memiliki latar belakang pendidikan yang selinier dengan tugas yang diemban di Pemerintah Desa Blumbungan.

3) Keaktifan Perangkat Desa

Keaktifan memang menjadi hal yang sangat penting dalam tercapainya tujuan organisasi atau instansi pemerintah. Seorang karyawan atau dalam hal ini adalah perangkat desa Blumbungan diharuskan untuk aktif dan bertanggungjawab atas pekerjaan yang diemban, meskipun banyak kendala yang dihadapi oleh perangkat desa Blumbungan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut, seperti yang disampaikan oleh kepala desa Blumbungan Ferry Andrianto Alvin, S.Pd. sebagai berikut:

“Untuk aktif tidaknya perangkat desa Blumbungan ya harus aktif dan harus bertanggung jawab karena perangkat desa merupakan kaki tangan dari masyarakat. Aktif dan bertanggung jawab itu beda, aktif itu ya aktif dalam kegiatan pemerintah desa dan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan, menurut saya aktif itu tidak begitu menjadi acuan yang mana perangkat desa yang bagus yang menjadi acuan bagi saya adalah bertanggungjawab kalau hanya aktif tapi tidak bertanggung jawab buat apa. Namun, selama ini sebagian besar perangkat desa aktif dan bertanggungjawab dalam menjalankan tugas-tugas yang harus mereka selesaikan meskipun banyak kendala untuk menyelesaikan tugas-tugas itu. Ya karena itu, pendidikannya tidak sesuai dengan tugasnya, contoh kaur keungan atau bendahara desanya hanya lulusan SMA dan yang menyusun laporan keuangan juga bukan lulusan ekonomi dan sebagainya itu, malahan dia lulusan bahasa Inggris.”³

Dari paparan di atas, kepala desa Blumbungan mengatakan bahwa perangkat desa Blumbungan sebagian besar aktif dan bertanggung jawab teradap tugas-tugas yang diemban meskipun banyaknya kendala yang dihadapi.

4) Upaya Kepala Desa Blumbungan

³ Wawancara langsung dengan Kepala Desa Blumbungan Bapak Ferry, tanggal 22 April 2022

Dalam upaya untuk mengurangi kendala-kendala yang dihadapi perangkat desa Blumbungan, kepala desa Blumbungan Ferry Andrianto Alvin, S.Pd. mengatakan bahwa beliau memaksimalkan gotong-royong atau menyelesaikan tugas bersama, saling tukar pikiran agar kendala-kendala yang dihadapi dapat diselesaikan. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh kepala desa Blumbungan saat di wawancarai oleh peneliti di kediamannya, sebagai berikut:

“Dari ketidaksesuaian antara pendidikan dan pekerjaan yang sekarang dilakukan oleh perangkat-perangkat saya upaya yang saya lakukan adalah dengan memaksimalkan gotong-royong yang memang menjadi tujuan utama dalam pemerintahan saya, karena saya melihat pada pemerintahan kemarin waktu saya menjadi perangkat desa rasa kekompakan dari teman-teman masih kurang sehingga terjadi rasa iri diantara perangkat-perangkat desa. Namun jika memang perangkat desa itu perlu untuk di *reshuffle* maka saya pasti akan mengganti perangkat desa tersebut karena takutnya akan terjadi hal-hal yang dapat merugikan pemerintahan desa Blumbungan dan masyarakat desa Blumbungan khususnya.”⁴

Dari hasil wawancara di atas, kepala desa menyampaikan kepada peneliti bahwa upaya yang akan dilakukan terhadap kinerja perangkat desa di Desa Blumbungan adalah dengan menekankan pada gotong-royong, akan tetapi jika perangkat desa tersebut perlu di *reshuffle* maka kepala desa akan mengganti perangkat desa tersebut.

Dari hasil wawancara peneliti dengan kepala desa Blumbungan selaku informan atau narasumber, kepala desa menyampaikan bahwa cara merekrut perangkat desa di Desa Blumbungan adalah cukup dengan cara musyawarah atau rapat internal dengan tim suksesnya, namun hasilnya apa yang dipilih dan ditetapkan oleh kepala desa latar pendidikan dan jabatan yang di emban di pemerintah desa Blumbungan tidak selinier atau tidak sesuai, akan tetapi kepala desa tidak me-*reshuffle* perangkat desa tersebut karena perangkat desa tersebut aktif

⁴ Wawancara langsung dengan Kepala Desa Blumbungan Bapak Ferry, tanggal 22 April 2022

dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya, namun kepala desa juga mengatakan bahwa jika perangkat desa tersebut sudah tidak berfungsi di pemerintah desa maka akan diganti atau di *reshuffle*. Upaya yang dilakukan oleh kepala desa terhadap kinerja perangkat desanya adalah dengan menekankan gotong-royong atau bekerja bersama karena kepala desa melihat perangkat desanya masih kurang dari segi latar belakang pendidikan.

b. Sekretaris Desa

Sekretaris Desa atau juga bisa disebut sebagai kaki tangannya Kepala Desa, dimana Sekretaris Desa memiliki tanggungjawab yang hampir sama dengan Kepala Desa. Sekretaris Desa memiliki peran utama yakni dalam menyiapkan pengelolaan administrasi desa, dan menyiapkan bahan laporan yang diperlukan oleh Kepala Desa atau Pemerintah Desa.

Sekretaris Desa adalah perangkat desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD).

Dalam wawancara dengan sekretaris desa selaku informan atau nrasumber kedua, peneliti menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada di *draft* wawancara. Ada empat poin pertanyaan yaitu, keterlibatan sekretaris desa dalam penyusunan laporan keuangan dan realisasi anggaran dana desa, pengendalian terhadap kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan keuangan desa, memverifikasi bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran keuangan desa, dan peran sekretaris desa dalam penyusunan laporan keuangan dan realisasi dana desa.

1) Latar Belakang Pendidikan Sekretaris Desa

Latar Belakang Pendidikan perangkat desa sangat penting dalam pelaksanaan tugas-tugas seorang perangkat desa, sekretaris desa di Desa Blumbungan merupakan lulusan S1 Ekonomi namun beliau mengatakan bahwa tidak ada kendala dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sebagaimana yang disampaikan dalam wawancara dengan peneliti berikut:

“Saya lulusan S1 Ekonomi di Stain Pamekasan dulu, namun hal ini tidak menjadi kendala bagi saya dalam menyelesaikan tupoksi saya karena tugas dari sekretaris desa hanya administrasi dan pengkoordinasian di dalam pemerintah desa. Ketidaksiain latar belakang pendidikan bukan pengaruh besar bagi saya, karena sebelum saya diangkat menjadi sekretaris desa, saya sudah belajar tugas-tugas dari sekretaris desa.”⁵

Dari penuturan yang disampaikan oleh sekretaris desa di atas bahwa, latar belakang pendidikan bagi beliau tidak berpengaruh terhadap tupoksi sekretaris desa, karena beliau sudah menyiapkan kemampuannya untuk menyelesaikan tugas-tugas seorang sekretaris Desa.

2) Tugas Sekretaris Desa

Dalam Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tugas dari seorang sekretaris desa selain sebagai pelaksana administrasi pemerintah desa sekretaris juga bertugas sebagai mengkoordinasikan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), sebagaimana yang sampaikan oleh sekretaris desa Blumbungan Miftahol Arifin, sebagai berikut:

“Tugas saya adalah mengkoordinasikan tugas perangkat desa dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Jadi, saya mau tidak mau harus terlibat dalam penyusunan laporan keuangan desa, karena dalam permendagri bahwa semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang berhubungan dengan kewajiban desa termasuk tugas dari sekretaris desa.”⁶

⁵ Wawancara langsung dengan Sekretaris Desa Blumbungan Bapak Arif, tanggal 25 April 2022

⁶ Wawancara langsung dengan Sekretaris Desa Blumbungan Bapak Arif, tanggal 25 April 2022

Dari hasil wawancara di atas, sekretaris desa terlibat dalam penyusunan laporan keuangan, hal ini dibuktikan bahwa sekretaris desa mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan di Desa Blumbungan.

3) Pengendalian Keuangan Desa

Keuangan dikendalikan oleh kepala pemerintahan, keuangan desa dikendalikan oleh kepala desa. Sebab, kepala pemerintahan desa adalah pemegang kekuasaan pemerintahan desa untuk transparansi keuangan desa. Kepala desa bertanggungjawab atas seluruh yang terjadi di pemerintahan desa, sebagaimana yang dituturkan oleh sekretaris desa sebagai berikut:

“Pengendalian itu tugas dari kepala pemerintahan, kalau di Desa adalah Kepala Desa, jadi saya tidak ikut campur dalam hal pengendalian itu. Karena pengendalian pemerintah untuk transparansi keuangan itu adalah kepala pemerintahan selaku pemegang kekuasaan pemerintahan.”⁷

Dari jbaran informasi di atas dapat diketahui bahwa sekretaris desa tidak melakukan pengendalian atas keuangan desa, karena pengendalian transparansi keuangan itu adalah kepala desa selaku pemegang kekuasaan.

4) Verifikasi Bukti Transaksi Keuangan

Dalam verifikasi keuangan adalah tugas dari seorang sekretaris, dengan adanya verifikasi dari sekretaris yang disahkan oleh kepala desa maka hal-hal yang tidak diinginkan dapat di minimalisir, dan transaksi keuangan desa berjalan dengan baik. Sebagaimana yang disampaikan oleh sekretaris desa sebagai berikut:

“Selain bertugas di administrasi desa, sekretaris desa itu adalah koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD), jadi saya harus memverifikasi bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran keuangan desa. Memang harus diverifikasi dan harus ada verifikasi sekretaris desa agar tidak ada hal yang tidak diinginkan di kemudian hari terkait keuangan desa

⁷ Wawancara langsung dengan Sekretaris Desa Blumbungan Bapak Arif, tanggal 25 April 2022

ini, karena keuangan desa ini merupakan hal yang paling utama dalam kemajuan desa.”⁸

Dari hasil wawancara di atas peneliti mendapatkan informasi bahwa keluar masuknya keuangan desa selain diverifikasi oleh bendahara desa juga diverifikasi oleh sekretaris desa untuk meminimalisir kesalahan agar tidak ada hal yang tidak diinginkan dikemudian hari.

5) Peran Sekretaris Desa Dalam Keuangan

Sekretaris Desa ikut andil dalam penyusunan dan pengelolaan laporan keuangan seperti APBDesa, hal ini dilakukan dengan cara musyawarah Desa. Peneliti menggali informasi tersebut dan mendapatkan informasi langsung dari sekretaris Desa Blumbungan bapak Miftahol Arifin.

“Saya sebagai perangkat desa dan sekarang diamanahi sebagai Sekretaris Desa, saya harus ikut andil dalam semua kegiatan desa termasuk keuangan desa karena hal ini menyangkut kepentingan bersama. Maka dari itu dalam pengelolaan dana desa atau APBDesa harus dilakukan musyawarah desa dimana kita saling bertukar pikiran sehingga mendapatkan hasil yang mufakat. Peran saya dalam penyusunan dan pengelolaan keuangan desa disini adalah mengkoordinasikan semua yang berhubungan dengan keuangan desa.”⁹

Pada informasi di atas sekretaris desa menjelaskan bahwa beliau ikut andil semua kegiatan keuangan desa, dan beliau berperan aktif dalam pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan Desa Blumbungan.

Dalam wawancara dengan sekretaris desa di atas, sekretaris desa Blumbungan selaku pimpinan sekretariat desa terlibat dan berperan aktif dalam keuangan Desa Blumbungan. Karena sekretaris desa merupakan koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD).

c. Bendahara Desa

⁸ Wawancara langsung dengan Sekretaris Desa Blumbungan Bapak Arif, tanggal 25 April 2022

⁹ Wawancara langsung dengan Sekretaris Desa Blumbungan Bapak Arif, tanggal 25 April 2022

Bendahara Desa adalah sebagai seorang yang bisa bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukan mengenai dana desa, dimana Bendahara Desa wajib bertanggung jawab atas pengeluaran, penyimpanan atau penyetoran dana desa agar bisa selalu terkendali. Bendahara Desa Blumbungan wajib bertanggung jawab akan transaksi yang dilakukan.

1) Latar Belakang Pendidikan Bendahara Desa

Dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugas-tugasnya, kemampuan seorang bendahara desa menjadi pertanyaan. Latar Belakang Bendahara Desa di Desa Blumbungan merupakan lulusan SMA yang tidak paham akan hal-hal yang berkaitan dengan keuangan, hal ini dibuktikan dari hasil wawancara peneliti dengan bendahara desa Blumbungan berikut:

“Latar Belakang Pendidikan saya hanyalah pendidikan SMA, saya tidak paham akan ilmu-ilmu keuangan kemampuan saya bukan di keuangan. Saya hanya bermodal banyak bicara untuk menjadi perangkat desa, tugas-tugas dari bendahara desa seperti menyusun laporan keuangan dan lain-lain itu dilimpahkan ke perangkat desa lainnya, saya hanya mencatat bukti-bukti transaksi dan keluar masuknya keuangan desa.”¹⁰

Dari hasil wawancara peneliti dengan bendahara di atas beliau menyampaikan bahwa, latar belakang pendidikannya hanyalah lulusan SMA yang tidak paham akan hal-hal yang berkaitan dengan keuangan, beliau hanya bermodal bicara (*public speaking*) untuk menjadi perangkat desa yaitu bendahara Desa.

2) Tugas Bendahara Desa

Bendahara Desa Blumbungan mengatakan bahwa beliau bertugas untuk mengeluarkan dana anggaran dengan syarat realisasi yang telah di verifikasi oleh sekretaris desa dan disahkan oleh kepala Desa Blumbungan. Bendahara sangat

¹⁰ Wawancara langsung dengan Bendahara Desa Blumbungan Bapak Rofik, tanggal 26 April 2022

bertanggungjawab dalam menjalankan tugasnya karena keluar masuknya keuangan keuangan desa adalah tugas dari bendahara, hal ini terbukti dari paparan dari bendahara desa Blumbungan sebagai berikut:

“Disini saya bertugas untuk mengeluarkan dana anggaran, tetapi saya tidak seenaknya dalam mengeluarkan dana tersebut, harus ada verifikasi dari sekretaris desa dan telah di sahkan oleh kepala Desa Blumbungan, agar tidak ada tindakan atau hal yang tidak diinginkan dibelakang nantinya, jika saya punya bukti nantinya saya dapat mempertanggungjawabkan itu dan enak dalam merealisasikan anggaran.”¹¹

Dari informasi di atas bendahara Desa Blumbungan sangat bertanggung jawab dan sangat berhati-hati dalam melaksanakan tugasnya yaitu dalam transaksi-transaksi anggaran dana desa di Desan Blumbungan.

Bendahara berperan untuk mencatat semua transaksi yang telah terjadi, bendahara desa Blumbungan sangat teliti dalam melakukan pencatatan, mulai dari transaksi terkecil maupun transaksi yang besar, dikarenakan pencatatan yang sangat teliti akan mengurangi kesalahan-kesalahan yang akan terjadi agar dapat dipertanggungjawabkan dengan jelas. Sebagaimana yang disampaikan oleh bendahara desa ketika diwawancarai oleh peneliti, beliau mengatakan bahwa yang digunakan untuk mencatat berbagai aktivitas transaksi penerimaan dan pengeluaran adalah buku kas umum (saya menyebutnya itu), buku kas umum ini bisa dikatakan sumber dokumen transaksi keuangan di Desa Blumbungan.

3) Tugas Bendahara Dalam Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam penyusunan laporan keuangan bendahara desa Blumbungan hanya mendampingi kasi pemerintahan yang merangkap tugas sebagai operator desa untuk menyusun laporan keuangan. Bendahara desa disini tidak paham akan

¹¹ Wawancara langsung dengan Bendahara Desa Blumbungan Bapak Rofik, tanggal 26 April 2022

penyusuna laporan keuangan, beliau tugasnya hanya mencatat transaksi-transaksi keuangan di Desa Blumbungan. Bahkan, beliau mencatat transaksi-transaksi itu dengan sederhana karena beliau bukan kemampuannya di keuangan. Sebagaimana apa yang dituturkan oleh bendahara desa Blumbungan sebagai berikut:

“Saya sebenarnya tidak paham tentang penyusunan laporan keuangan, disini saya hanya mencatat transaksi-transaksi keuangan desa saja. Saya mencatat transaksi-transaksi atau keluar masuknya keuangan desa itu dengan sederhana, karena saya hanya lulusan SMA yang sama sekali tidak paham tentang pelaporan keuangan, jadi saya hanya mendampingi operator desa dalam melakukan penyusunan laporan keuangan.”¹²

Dari hasil wawancara di atas, peneliti mendapatkan informasi bahwasanya bendahara itu hanya melakukan pencatatan transaksi keuangan di Desa Blumbungan dikarenakan beliau tidak paham dengan penyusunan laporan keuangan.

4) Pertanggungjawaban Bendahara Desa

Pertanggungjawaban untuk bendahara desa di Desa Blumbungan adalah hal yang sangat penting, karena dari bendaharalah semua bukti-bukti transaksi dan semua pelaporan serta pencatan yang dilakukan ada di bendahara desa. Informasi yang didapatkan peneliti dari narasumber sebagai berikut:

“Pertanggungjawaban yang harus ada dibendahara desa adalah pelaporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan, namun disini yang menyelesaikan pelaporan keuangan desa adalah kaur perencanaan dikarenakan saya tidak memahami ilmu-ilmu tentang laporan keuangan tersebut.”¹³

Dari apa yang dituturkan oleh bendahara di atas bahwa jadi seorang bendahara desa harus siap untuk bertanggungjawab dan siap menanggung resiko karena keuangan merupakan hal yang sangat penting dalam instansi.

¹² Wawancara langsung dengan Bendahara Desa Blumbungan Bapak Rofik, tanggal 26 April 2022

¹³ Wawancara langsung dengan Bendahara Desa Blumbungan Bapak Rofik, tanggal 26 April 2022

d. Kepala Urusan (KAUR) Perencanaan

Kasi Pemerintahan adalah perangkat desa yang membidangi pengelolaan dibagian pemerintahan, dimana tugas dari Kasi Pemerintahan yakni melaksanakan kegiatannya di bagian kantor seperti data kependudukan, sarana dan prasarana untuk kebutuhan dibidang pemerintahan Desa Blumbungan.

Selain tugas di atas, Kasi Pemerintahan di Desa Blumbungan juga bertanggungjawab atas pelaporan-pelaporan terkait bukti-bukti dengan baik karena menggunakan anggaran dana desa, dan juga bertanggungjawab atas pelaporan keuangan di Desa Blumbungan.

1) Kemampuan Kaur Perencanaan

Kemampuan Kasi Pemerintahan dalam menyusun dan mengelola keuangan desa di Desa Blumbungan menjadi hal sangat penting, karena Kasi Pemerintahan adalah seorang yang mengelola dan menyusun laporan keuangan. Oleh karena itu, seorang Kasi Pemerintahan harus mempunyai kemampuan dalam mengelola dan menyusun laporan keuangan.

Dari hasil wawancara antara peneliti dengan narasumber, beliau mengatakan bahwa awal beliau menjabat sebagai Kaur Perencanaan kemampuan beliau dalam mengelola dan menyusun laporan keuangan masih minim dan bahkan tidak paham sama sekali dengan ilmu tersebut. Namun ada pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Pusat yang dilakukan 3 bulan sekali setelah laporan keuangan.

Dari paparan yang disampaikan oleh Kaur Perencanaan di atas beliau mengatakan bahwa, pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan adalah bukan kemampuannya namun beliau berusaha untuk belajar ilmu tersebut karena sudah

menjadi tuntutan dalam pekerjaan yang saat ini beliau emban di Pemerintah Desa Blumbungan.

2) Cara Menyusun Laporan Keuangan

Dalam menyusun laporan keuangan desa kepala desa membentuk sebuah tim untuk menyelesaikan laporan keuangan tersebut, mengingat kemampuan dari perangkat desanya kurang pemahaman akan keuangan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Kaur Perencanaan berikut:

“Dalam penyusunan laporan keuangan, desa itu membentuk sebuah tim untuk menyelesaikan penyusunan laporan keuangan, dalam melakukan penyusunan laporan keuangan di tim itu kami bekerja sama saling bertukar pikiran untuk menyusun laporan keuangan yang akuntabel dan transparan. Sebelum diinput ke aplikasi SISKEUDES, kami menggunakan metode item yang ditulis secara rinci di buku besar setiap item yang ada misal ada 100 item ya 100 item harus dicantumkan disitu. Dari item-item tersebut barulah diinput ke aplikasi SISKUEDES yang nantinya akan muncul laporan keuangan tersebut. Jadi tidak ribet dalam melakukan penyusunan laporan keuangan itu.”¹⁴

Dari penuturan Kaur Perencanaan di atas beliau menyampaikan bahwa, dalam penyusunan laporan keuangan dibentuk sebuah tim untuk menyelesaikan laporan keuangan. Dalam penyusunannya menggunakan metode item yang akan diinput ke dalam aplikasi untuk menghasilkan sebuah laporan keuangan.

3) Pengelolaan Keuangan Desa

Sebelum menggunakan anggaran desa yang diberikan oleh pemerintah pusat, pemerintah desa melakukan proses perencanaan untuk mempermudah realisasi anggaran. Proses perencanaan tersebut dilakukan terlebih dahulu dengan melakukan musyawarah desa bersama BPD untuk menampung aspirasi rakyat Desa

¹⁴ Wawancara langsung dengan Kaur Perencanaan Bapak Nasrullah, pada tanggal 28 April 2022

Blumbungan yang berguna untuk arah penggunaan anggaran dana desa. Hal ini memberikan kemudahan dalam mengkoordinir kebutuhan anggaran dana desa yang akan direalisasikan. Untuk itu peneliti menanyakan terlebih dahulu tahap perencanaan yang dilakukan pemerintah desa.

“Dalam merealisasikan dana anggaran dari pemerinta pusat, kami tidak semerta-merta langsung menggunakan atau merealisasikan anggaran tersebut, akan tetapi ada tahap-tahap yang dilakukan sebelumnya. Tahap pertama adalah perencanaan dengan mengadakan musyawarah desa dengan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) agar pemerintah desa dapat mengetahui apa yang memang menjadi kebutuhan masyarakat Desa Blumbungan serta apa yang memang perlu kita realisasikan kepada mereka, karena kita harus benar-benar memberikan pelayanan terbaik bagi mereka. Setelah musyawarah tersebut selesai nantinya akan ada hasil dari musyawarah tersebut, kemudian pemerintah desa membentuk tim pengelolaan teknis keuangan desa (PTKD).”¹⁵

Hasil penuturan yang disampaikan di atas adalah, perencanaan dilakukan dengan melakukan musyawarah desa antara perangkat desa dengan BPD selaku wakil masyarakat untuk mencari hasil kesepakatan dalam merealisasikan anggaran desa.

Kemudian dalam tahap pelaksanaan yaitu dengan mengeluarkan dana anggaran desa dengan syarat realisasi yang telah di musyawarahkan dan telah diverifikasi oleh sekretaris desa dan disahkan oleh kepala desa Blumbungan.

Peneliti juga mewawancarai hal itu, sebagai berikut:

“Dalam tahap pelaksanaan untuk mengeluarkan dana anggaran, tidak seenaknya untuk mengeluarkan harus ada verifikasi dari sekretaris desa yang disakan oleh kepala desa, agar tidak ada masalah yang tidak diinginkan dikemudian hari.”¹⁶

Dari paparan wawancara di atas diketahui bahwa pemerintah desa sangat bertanggung jawab dan berhati-hati dalam transaksi anggaran desa Blumbungan. Dalam tahap penatausahaan adalah untuk mencatat semua transaksi yang telah

¹⁵ Wawancara langsung dengan Kaur Perencanaan Bapak Nasrullah, pada tanggal 28 April 2022

¹⁶ Wawancara langsung dengan Kaur Perencanaan Bapak Nasrullah, pada tanggal 28 April 2022

terjadi, dalam melakukan tahap penatausahaan ini pemerintah desa Blumbungan sangat inten dalam melakukan pencatatan, mulai dari transaksi yang kecil maupun transaksi terbesar, agar pencatatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan, berikut wawancara peneliti dengan Kaur Perencanaan Desa Blumbungan:

“Pencatatan yang harus disiapkan dalam tahap penatausahaan adalah buku kas umum yang digunakan untuk mencatat berbagai transaksi penerimaan dan pengeluaran dana anggaran, buku kas umum ini bisa dikatakan sumber dokumen transaksi dan satu-satunya yang dimiliki oleh pemerintah desa.”¹⁷

Dalam wawancara di atas, pada tahap penatausahaan ini yang perlu disiapkan adalah buku kas umum untuk mencatat semua transaksi yang telah terjadi. Pada tahap pelaporan dengan melakukan penyusunan laporan realisasi pelaksanaan APBDes dan laporan pertanggungjawaban. Hal ini sangat penting untuk melaporkan segala pencatatan yang telah dilakukan dalam penyaluran anggaran des. Dalam melakukan pelaporan dilakukan dengan transparansi dan tidak ada yang ditutup-tutupi agar tidak ada kesalah pahaman, sebagaimana yang disampaikan dalam wawancara berikut:

“Perihal pelaporan realiasi pelaksanaan dilakukan oleh tim PTKD, dalam pelaporan dilakukan dengan sangat teliti sehingga tidak ada yang salah untuk menjauhi hal-hal yang tidak diinginkan dalam proses pelaporan. Untuk pelaksanaan tutup buku biasanya dilakukan setiap tiga bulan sekali.”¹⁸

Dari hasil wawancara di atas adalah pelaporan keuangan desa dilakukan dengan cara berhati-hati untuk meminimalisir kesalahan yang akan terjadi dikemudian hari serta agar tidak ada kesalah pahaman yang terjadi maka dilakukan dengan transparan dan akuntabel.

Dalam tahap pertanggungjawaban adalah hal yang sangat penting untuk mempertanggungjawabkan semua bukti-bukti transaksi dan semua pelaporan serta

¹⁷ Wawancara langsung dengan Kaur Perencanaan Bapak Nasrullah, pada tanggal 28 April 2022

¹⁸ Wawancara langsung dengan Kaur Perencanaan Bapak Nasrullah, pada tanggal 28 April 2022

pencatatan tutup buku yang dilakukan. Informasi yang didapatkan peneliti sebagai berikut:

“Pertanggung jawaban yang harus ada adalah pelaporan realisasi dari pemasukan, pendapatan, dan pengeluaran itu adalah pertanggung jawaban saya. Jika saya tidak bisa mempertanggung jawabkan itu semua, maka harus siap dapat resiko.”¹⁹

Dari penuturan kaur perencanaan pertanggung jawaban yang harus dipertanggung jawabkan adalah semua pelaporan keuangan, karena resiko akan ada jika pertanggung jawaban tersebut tidak dipertanggung jawabkan.

4) Kendala Dalam Penyusunan Laporan keuangan

Kendala informasi akuntansi dan laporan keuangan merupakan setiap keadaan, dimana tidak mungkin terwujudnya kondisi yang ideal dalam mewujudkan laporan keuangan yang relevan dan andal dalam keterbatasan latar belakang pendidikan. Ada beberapa kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa Blumbungan dalam penyusunan laporan keuangan. Dengan keterbatasan kemampuan pemerintah desa dalam keuangan, kendala yang dihadapi adalah sulitnya membaca laporan keuangan, *balancing* antara RAK manual dengan RAK di aplikasi. Sebagaimana yang disampaikan dalam wawancara berikut:

“Untuk kendala yang dihadapi dalam pemerintah desa tentang penyusunan laporan keuangan disini adalah cara membacanya, karena diaplikasi itu hasilnya glondondan gaka ada penjelasannya, saya yakin meskipun itu anak keuangan saya yakin mereka juga kesulitan dalam membaca laporan itu. Dan yang kendala yang paling parah dan yang paling sulit untuk dibenahi adalah *balancing* antara RAK manual dengan RAK yang di aplikasi, ini yang kemudian perlu kehati-hatian dan ketelitian dalam melakukan hal ini. Jadi kendalanya ada dua ya, pengerjaanya dan mengklopkannya”²⁰

¹⁹ Wawancara langsung dengan Kaur Perencanaan Bapak Nasrullah, pada tanggal 28 April 2022

²⁰ Wawancara langsung dengan Kaur Perencanaan Bapak Nasrullah, pada tanggal 28 April 2022

Dari hasil wawancara dari Kaur Keuangan diatas adalah permasalahan yang dihadapi adalah sulit untuk memahami isi laporan tersebut dan *balancing* antara RAK manual dengan RAK yang diaplikasi.

Dengan kesepakatan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan kepala desa Blumbungan menetapkan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa Blumbungan tahun anggaran 2021 sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 2.576.191.869,65
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 846.836.250,91
b. Bidang Pembangunan Desa	Rp. 668.923.720,00
c. Bidang Pembinaan dan Kemasyarakatan	Rp. 52.000.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 2.500.000,00
e. Belanja Tak Terduga	Rp. 993.000.000,00
Jumlah Belanja	Rp. 2.563.859.970,91
Surplus/(defisit)	Rp. (2.350.716,34)
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 10.498.249,65
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 2.350.716,34
	Rp. 8.147.533,31
4. Slipa/Slipa Tahun Berjalan	Rp. 8.147.533,31

Laporan Realisasi Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Pemerintah Desa Blumbungan
Tahun Anggaran 2021

Tabel 4.6 Laporan Realisasi

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH/(KURANG)
(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5
4	Pendapatan			
4.2	Pendapatan Transfer	2.505.693.620,00	2.560.357.150,00	5.325.470,00
4.2.1	Dana Desa	1.723.516.000,00	1.723.816.000,00	0,00
4.2.2	Bagi Hasil Pajak dan retribusi	79.996.920,00	79.996.918,00	2,00
4.2.3	Alokasi Dana Desa	761.880.700,00	756.554.232,00	5.326.458,00
4.3	Pendapatan Lain-lain	0,00	1.142.104,57	(1.142.104,57)
4.3.8	Bunga Bank	0,00	1.142.104,57	(1.142.104,57)
	Jumlah Pendapatan	2.555.693.620,00	2.561.509.254,57	4.184.365,43
5	BELANJA			
5.1	Belanja Pegawai	665.993.520,00	680.154.830,00	5.805.890,00
5.1.1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	32.719.680,00	32.427.600,00	292.080,00
5.1.2	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	602.673.840,00	597.157.030,00	5.516.810,00
5.1.4	Tunjangan BPD	30.500.000,00	30.500.000,00	0,00
5.2	Belanja Barang dan Jasa	561.534.329,65	555.011.620,91	6.622.708,74
5.2.1	Belanja Barang Perengkapan	293.714.333,47	289.789.200,00	3.925.133,47
5.2.2	Belanja Jasa Honorarium	198.545.996,18	195.124.000,00	2.921.996,18
5.2.3	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00
5.2.5	Belanja Operasional Perkantoran	9.024.000,00	9.348.420,91	(324.420,91)
5.2.6	Belanja Pemeliharaan	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00
5.2.7	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan Kepada	54.350.000,00	54.350.000,00	0,00
5.3	Belanja Modal	355.064.020,00	355.063.720,00	300,00
5.3.2	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Mesin dan alat	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
5.3.4	Belanja Modal Gedung, Bangunan, dan Taman	35.800.000,00	35.800.000,00	0,00
5.3.5	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	241.437.320,00	241.437.020,00	300,00
5.3.7	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah	74.326.700,00	74.326.700,00	0,00
5.4	Belanja Tidak Terduga	993.600.000,00	993.600.000,00	0,00
5.4.1	Belanja Tidak Terduga	993.600.000,00	993.600.000,00	0,00
	JUMLAH BELANJA	2.576.191.869,65	2.563.859.970,91	12.331.898,74

	SURPLUS/(DEFISIT)	(10.498.249,65)	(2.350.716,34)	(8.147.533,31)
6.	PEMBIAYAAN			
6.1	Penerimaan Pembiayaan	10.498.249,65	10.498.249,65	0,00
6.1.1	SILPA Tahun Sebelumnya	10.498.249,65	10.498.249,65	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	10.498.249,65	10.498.249,65	0,00

Sumber: Kaur Perencanaan Desa Blumbungan

Dari penjabaran data di atas merupakan paparan Dana pendapatn dan belanja yang ada di Desa Blumbungan, dimana apabila dilihat laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa di pemerintah Desa Blumbungan sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Dengan adanya pelatihan yang diadakan oleh pemerintah kabupaten dan pemerintah pusat dapat membantu pemerintah desa dalam menyusun laporan keuangan desa Blumbungan.

B. Temuan Penelitian

Dari hasil paparan data yang di paparkan narasumber dari hasil wawancara di lapangan antara peneliti dengan perangkat Desa Blumbungan, ditemukan beberapa hasil temuan untuk dijadikan bahan laporan sebagai bentuk tulisan lainnya sebagai berikut:

1. Dalam perekrutan aparatur desa atau perangkat desa, pemerintah desa Blumbungan memiliki cara yang berbeda dalam melakukan perekrutan perangkat desa yaitu dengan hanya mengadakan musyawarah atau rapat internal dengan tim suksesnya, sehingga dampak dari perekrutan tersebut menyebabkan latar belakang pendidikan dengan jabatan yang diemban tidak sesuai. Di Desa Blumbungan memiliki perangkat desa yang lumayan banyak dikarenakan luas dari Desa Blumbungan juga lumayan luas, namun keaktifan dari perangkat Desa Blumbungan kurang aktif dalam melaksanakan kewajibannya sehingga kepala desa Blumbungan menekankan untuk

melakukan gotong royong atau kerjasama dalam menyelesaikan tugas-tugasnya.

2. Sekretaris Desa selain bertugas sebagai administrasi desa juga bertugas untuk mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan, hal ini bertujuan untuk mengawasi keuangan desa agar sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat Desa Blumbungan. Sekretaris Desa juga diharuskan untuk memverifikasi transaksi-transaksi keuangan desa karena sekretaris desa merupakan pelaksana pengelolaan keuangan desa (PPKD), namun untuk pengendalian keuangan desa merupakan tanggungjawab secara penuh dari kepala desa. Jadi, sekretaris desa disini ikut andil dalam pelaksanaan keuangan desa untuk meminimlisir kesalahan-kesalahan yang akan terjadi karena keuangan desa merupakan hal yang sangat penting dalam kemajuan Desa Blumbungan dan kesejahteraan masyarakat. Sekretaris Desa Blumbungan merupakan lulusan S1 Ekonomi, namun beliau bisa menyelesaikan tugas-tugasnya dengan mempersiapkan kemampuannya sebelum menjabat seorang sekretaris desa di Desa Blumbungan.
3. Bendahara Desa Blumbungan bertugas dalam pencatatan transaksi-transaksi keuangan desa, pengeluaran keuangan desa, dan pendapatan keuangan desa. Bendahara Desa di Desa Blumbungan tidak melakukan penyusunan laporan keuangan seperti realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan dikarenakan kurang paham akan keuangan sehingga menyebabkan berkurangnya tugas bagi bendahara desa tersebut dan dilimpahkan kepada perangkat desa lainnya yang bukan bidang tugasnya, namun didalam hal itu bendahara desa sangat bertanggungjawab dalam mengawasi keluar masuknya keuangan desa. Hal tersebut terjadi karena latar belakang pendidikan dari

bendahara desa hanya seorang lulusan SMA dan kurang paham akan hal-hal yang berkaitan dengan keuangan.

4. Kemampuan kaur perencanaan dalam menyusun laporan keuangan awalnya masih minim, namun dengan adanya pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh pemerintah kabupaten dan pemerintah pusat dapat menambah wawasan tentang cara menyusun laporan keuangan. Dalam pengelolaan anggaran dana desa, di Pemerintah Desa Blumbungan ada tahap-tahap yang dilakukan yakni, perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban. Dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah Desa Blumbungan membentuk sebuah tim untuk menyelesaikannya, agar terciptanya laporan keuangan yang akuntabel. Namun, masih ada Kendala yang dihadapi oleh kaur perencanaan dalam menyusun laporan keuangan yakni cara membaca laporan dan *balancing* karena dalam menginput data transaksi keuangan hanya dengan item.

C. Pembahasan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh komang Widayarni dan Ni Made Dwi Ratnadi pada tahun 2016 menyatakan bahwa latar belakang pendidikan berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan, ada juga yang menyatakan latar belakang pendidikan berdampak positif terhadap laporan keuangan tertulis dalam penelitian Susan Triswati pada tahun 2019. Artinya latar belakang pendidikan sangat berdampak terhadap laporan keuangan yang berkualitas.

Pada dasarnya aparatur Pemerintah Desa atau perangkat desa merupakan roda penggerak dalam menjalankan pemerintahan desa. Latar Belakang Pendidikan dan kemampuan seorang perangkat desa menjadi hal yang sangat penting dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang ada di pemerintahan desa.

1. Dampak Latar Belakang Pendidikan Perangkat Desa dalam Akuntabilitas Laporan keuangan.

Laporan keuangan merupakan media bagi sebuah badan dalam hal ini untuk mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya kepada masyarakat. Pemerintah Desa harus mampu menyajikan informasi keuangan yang tepat dan berkualitas. Terlebih Pasal 32 Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara mengamanatkan bahwa isi dan bentuk laporan pertanggungjawaban pelaksanaan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).²¹ Dalam mempertanggungjawabkan laporan keuangan pemerintah Desa Blumbungan harus mempersiapkan SDM yang berkualitas serta mampu memahami logika akuntansi dengan baik, keberadaan sumber daya manusia menjadi sangat penting karena segala kewenangan dan tanggungjawab berkaitan dengan keberadaan sumber daya manusia, kapasitas sumber daya manusia yang harus tersedia dipengaruhi oleh dua hal penting yaitu kualitas dan kuantitas.²²

Latar belakang pendidikan sangat penting dalam menciptakan SDM yang berkualitas, kesesuaian latar belakang pendidikan dengan jenis pekerjaan yang dilakukan sangat berpengaruh. Fontanella mengatakan bahwa “latar belakang pendidikan merupakan salah satu elemen kunci dalam penyediaan dan pemanfaatan laporan keuangan pemerintah”. Orang yang berpendidikan akan lebih rasional

²¹ Swesty Flowerina, Rina Asmeri, dan Delory Nancy Meyla. “Pengaruh Latar Belakang Pendidikan dan Pengatahuan Akuntansi Terhadap Pemanfaatan Laporan Keuangan Daerah Pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat,” *Pareso Jurnal*, Vol. 3, No. 2 (Juni 2021), 438.

²² Sri Dewi Anggadini, Vira Mutiara Subekti, Sari Damayanti, dan Egi Fahrana. “Ketrandalan Laporan Keuangan : Dampak Dari Kualitas SDM dan Teknologi Informasi,” *Accounting Information Systems and Informtion Technology Business Enterprise*, Vol. 6, No. 1 (Juni 2021), 18.

dalam berpikir dan bertindak, serta memahami tugas dan tanggungjawab yang dibebankan dengan baik.²³

a. Pendidikan Formal

Latar belakang pendidikan perangkat desa di pemerintah desa Blumbungan tidak sesuai dengan pekerjaan yang diemban saat ini. Hal ini disebabkan karena dalam perekrutan perangkat desa tidak diseleksi dengan baik sehingga terjadi banyak kendala yang dihadapi perangkat desa yakni kurangnya perencanaan dalam menyelesaikan tugasnya yaitu penyusunan laporan keuangan dan pengelolaan anggaran desa terutama dalam *balancing* dan membaca laporan keuangan.

Dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelatihan merupakan kegiatan atau usaha untuk mempersiapkan tenaga kerja, dengan pelatihan maka akan tercipta sumber daya yang berkualitas dan dapat mempertanggungjawabkan tugasnya. Sesuai dengan Visi dan Misi Desa Blumbungan yaitu “Gotong Royong membangun Desa Blumbungan yang jujur, adil, sejahtera, berbudaya dan berakhlak mulia” upaya dalam mempertanggungjawabkan laporan keuangan adalah dengan gotong royong, pemerintah kabupaten dan pemerintah pusat yang mengadakan pelatihan dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Dengan ketidaksesuaian latar belakang pendidikan dengan pekerjaan yang diemban di pemerintah desa blumbungan menyebabkan banyaknya kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa Blumbungan dalam akuntabilitas laporan keuangan yakni memahami hasil laporan keuangan yang telah diinput dari aplikasi SISKUEDES dan *balancing* pada laporan keuangan Desa Blumbungan.

b. Pendidikan non-Formal

²³ Rusmanto, Indra Saputra, dan Makhriati. “Pengaruh Tingkat Pendidikan, Latar Belakang Pendidikan, Pengalaman dan Faktor Sosial Terhadap Pemanfaatan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Pada SKPD Kota Banjarmasin,” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 12, No. 2 (September 2019), 302.

Banyak ilmu yang dapat dipelajari meskipun bukan dari bangku sekolah atau perkuliahan. Ilmu juga bisa di dapatkan dari luar dengan adanya pelatihan, workshop, seminar, dll. Seperti halnya yang terjadi di Desa Blumbungan banyak perangkat desa yang latar belakang pendidikan formalnya tidak sesuai dengan pekerjaan yang di emban, namun masalah tersebut tidak menjadi kendala bagi Desa Blumbungan itu sendiri karena Pemerintah Pusat menyelenggarakan pelatihan terkait tugas dari perangkat desa tersebut.

Pendidikan non-formal dipandang sebelah mata oleh kebanyakan masyarakat dikarenakan tidak adanya bukti bahwa pernah melakukan pendidikan, beda halnya dengan pendidikan formal yang mempunyai bukti berpendidikan.

2. Dampak Latar Belakang Pendidikan Perangkat Desa Dalam Penyusunan Laporan Keuangan.

Dalam penyusunan laporan keuangan desa melibatkan perangkat desa yang diketuai oleh kepala desa. Masih minimnya kualitas perangkat desa terlebih pada penjabat pelaksana pengelola keuangan di desa mengharuskan laporan keuangan desa harus disusun secara sederhana sehingga sehingga memudahkan aparatur desa dalam penyusunan laporan keuangan desa, sehingga laporan keuangan desa dapat disusun dengan baik dan tetap memberikan informasi yang relevan untuk pengambilan keputusan.²⁴

Penyusunan laporan keuangan desa didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Laporan Keuangan Desa yang mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan Pemerintahan yang tertuang dalam PP. No. 71 Tahun 2010. Hal ini dikarenakan

²⁴ Edwin Triyuwono, "Laporan Keuangan Desa : Sebuah Tinjauan (Village Financial Statement : A Review)," *Jurnal Universitas Atma Jaya Makassar* (2019), 3.

desa merupakan bagian dari pemerintahan Republik Indonesia.²⁵ Dalam penyusunan laporan keuangan di Desa Blumbungan dicatat dengan sesederhana mungkin karena dengan berkembangnya teknologi Pemerintah Pusat menciptakan sebuah aplikasi yang dapat mempermudah perangkat desa dalam penyusunan laporan keuangan desa.

Untuk mempermudah penyusunan laporan keuangan desa Pemerintah Pusat yang berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten melakukan pembinaan terhadap perangkat desa agar terciptanya laporan keuangan yang akuntabel dan relevan. Selain itu, Pemerintah Pusat juga menciptakan sebuah aplikasi yakni SISKEUDES yang dapat membantu perangkat desa untuk menyusun laporan keuangan desa. Dengan adanya aplikasi SISKEUDES tersebut Pemerintah Desa Blumbungan merasa bersyukur karena dengan aplikasi tersebut penyusunan laporan keuangan desa dapat terselesaikan dengan baik. Dalam penyusunannya Pemerintah Desa Blumbungan hanya mencatat item transaksi dengan sederhana yang nantinya akan diinput ke aplikasi SISKEUDES dan akan terbentuk laporan keuangan desa tanpa menyusun sendiri.

Dengan berkembangnya teknologi, ketidaksesuaian latar belakang pendidikan dengan pekerjaan yang diemban tidak menyebabkan banyak kendala yang mungkin akan dihadapi. Dengan adanya aplikasi SISKEUDES ketidaksesuaian latar belakang pendidikan tidak berdampak terhadap penyelesaian tugas dari pekerjaannya dalam hal ini adalah penyusunan laporan keuangan

²⁵ Ibid, 8